Diterima: 28 Sept 2026 ; Direvisi: 2 Nov 2026 ; Diterbitkan: 10 Nov 2026

ANALISIS KOMPARATIF KOMUNIKASI PUBLIK DIGITAL UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI MEDIA SOSIAL X DAN IG

Arissy Jorgi Sutan [1*], Kayla Sefrianti2, Syafina2, Arina Manasikah2, Wulandari2, Mirza Sazeta1, Jefri Al Kausar1, Fajar Alan Syahrier1
[1&2] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Email: arissyjorgisutan@unja.ac.id

ABSTRACT

This study examines how prominent Indonesian institutions use X and Instagram to promote women and children's rights online. Social media have become an important digital public forum for human rights advocacy, but empirical comparative research on platform-specific communication skills, message framing, and strategic messaging across social networks is scarce. A descriptive qualitative research framework was used to collect data from 108 public posts of four major Indonesian gender and child protection organisations (KPPPA, KPAI, Asosiasi LBH APIK, and Komnas Perempuan) and analyse it using NVivo 12 Plus with word cloud, crosstab query, cluster, and Pearson Instagram is better for structured rights advocacy (40.38%) and institutional impact documentation (49.06%), whereas X is better for direct educational exchanges (37.50%), narrative development (27.45%), and domestic abuse aid (17.86%). Very strong Pearson correlations (0.8631-0.9566). Maintain an integrated ecosystem for violence prevention, legal advocacy, education, and rights protection. Instagram captures policy declarations visually, whereas X is a fast-moving platform for quick agenda-setting. Institutional directives greatly impact output, but low platform engagement metrics reveal broadcasting silos. To improve digital advocacy, cross-platform referral systems, proactive consultation services, and transparent case-tracking interfaces are needed to provide legal safeguards.

ABSTRACT

Studi ini mengkaji bagaimana lembaga-lembaga terkemuka di Indonesia memanfaatkan X dan Instagram untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak secara daring. Media sosial telah menjadi forum publik digital yang penting bagi advokasi hak asasi manusia, namun penelitian komparatif empiris mengenai keterampilan komunikasi spesifik platform, pembingkaian pesan, dan strategi penyampaian pesan di berbagai jejaring sosial masih jarang dilakukan. Kerangka penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari 108 unggahan publik milik empat organisasi besar Indonesia yang bergerak di bidang gender dan perlindungan anak (KPPPA, KPAI, Asosiasi LBH APIK, dan Komnas Perempuan) serta

menganalisisnya menggunakan NVivo 12 Plus melalui metode word cloud, crosstab query, cluster, dan korelasi Pearson. Hasilnya menunjukkan bahwa Instagram lebih unggul untuk advokasi hak yang terstruktur (40,38%) dan dokumentasi dampak kelembagaan (49,06%), sedangkan X lebih efektif untuk pertukaran edukatif langsung (37,50%), pengembangan narasi (27,45%), dan penyaluran bantuan terkait kekerasan dalam rumah tangga (17,86%). Ditemukan pula korelasi Pearson yang sangat kuat (0,8631–0,9566). Diperlukan pemeliharaan ekosistem terintegrasi untuk pencegahan kekerasan, advokasi hukum, pendidikan, dan perlindungan hak. Instagram mampu menampilkan deklarasi kebijakan secara visual, sementara X merupakan platform yang dinamis untuk pembentukan agenda secara cepat. Arahan kelembagaan sangat memengaruhi hasil komunikasi, namun rendahnya metrik keterlibatan (engagement) di platform menunjukkan adanya pola komunikasi yang terisolasi (silo). Untuk meningkatkan advokasi digital, diperlukan sistem rujukan lintas platform, layanan konsultasi proaktif, dan antarmuka pelacakan kasus yang transparan guna menjamin perlindungan hukum.

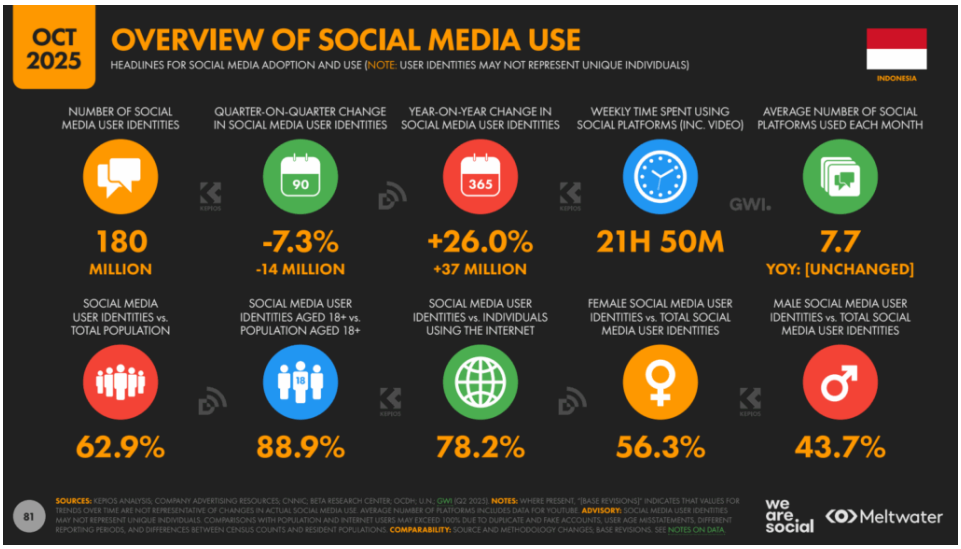
Kata Kunci: *Komunikasi publik digital, Hak perempuan dan anak, Media Sosial*

PENDAHULUAN

Studi ini membandingkan dan mengeksplorasi wacana publik di situs media sosial untuk mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak di ruang media sosial X dan IG. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap promosi hak asasi manusia selama beberapa dekade terakhir. D Dan di dunia yang semakin digital, media sosial telah muncul sebagai alat dinamis bagi aktivis, LSM, dan organisasi akar rumput untuk memajukan hak-hak perempuan dan anak-anak, mengubah lanskap global aktivisme hak asasi manusia (Christian & Lukitawati, 2023; Coombs & Holladay, 2022; Faria et al., 2020; Nurcandrani et al., 2020). Dalam contoh Indonesia menujukan pengguna social media dibandingkan pada total populasi berjumlah 62,9%, Hal ini menunjukan adanya proporsi pengunaan social media yang massif di Indonesia pada gambar 1 dan data perbandingan berdasarkan durasi sesi pada gambar 2 .

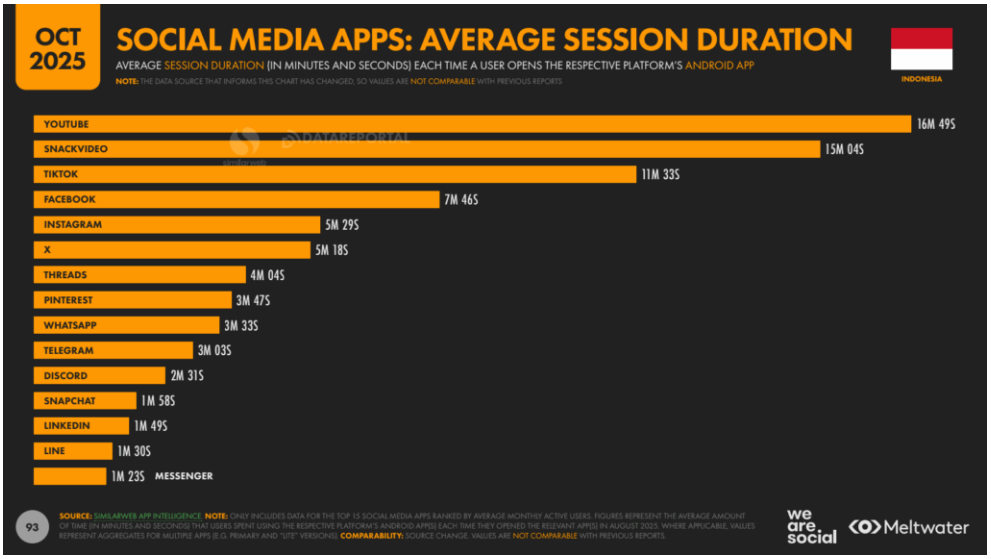
Gambar 1.

Overview of Social Media Use in Indonesia
(Sumber: wearesocial)



Gambar 2.

Social Media Apps: Average Session Duration
(Sumber: wearesocial)



Platform media sosial memberikan cara bagi para advokat untuk mempromosikan solidaritas global, mendemokratisasi akses ke sumber daya hukum dan kesehatan yang penting, serta meminta pertanggungjawaban aktor negara dan entitas korporasi secara real time dengan membongkar batas geografis tradisional, hambatan budaya, dan kontrol media terpusat. Gerakan viral dan upaya internet terdesentralisasi telah menjadikan masalah lokal seperti kekerasan berbasis gender, hak reproduksi, ketidakadilan kerja, pernikahan anak, dan ketidaksetaraan pendidikan menjadi tujuan global yang mendesak (Bucchi & Trench, 2021; Charmaz, 2020; Quesenberry, 2020). Media sosial menawarkan lebih dari sekadar pengetahuan; media sosial menawarkan sistem dukungan sebaya yang diinformasikan trauma, partisipasi sipil digital, dan penceritaan yang tulus, yang memungkinkan perempuan dan gadis muda membagikan kisah mereka langsung kepada audiens global tanpa intervensi editorial. Perubahan ini memungkinkan kelompok terpinggirkan, terutama yang berada di daerah konflik, situasi politik represif, atau komunitas yang terbungkam, untuk menjadi pemimpin aktif dalam cerita yang dapat dengan cepat menggerakkan petisi dunia, mengumpulkan bukti pelanggaran hak asasi manusia, dan mengoordinasikan bantuan timbal balik darurat. Selain itu, penggunaan media sosial secara taktis memaksa badan tata kelola global, koalisi masyarakat sipil, dan

platform teknis komersial untuk melihat kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai perhatian 'arus utama', bukan sebagai perhatian pinggiran, untuk masyarakat dinamis dan demokratis. Oleh karena itu, platform digital telah berkembang dari sekadar alat komunikasi menjadi situs penting untuk perubahan sistemik, memungkinkan mobilisasi hukum yang cepat, lobi kebijakan, dan aktivisme global yang terus-menerus mendefinisikan ulang lanskap advokasi hak asasi manusia (Anwar et al., 2020; Hauser, 2022; Lipschultz, 2023; Malecki et al., 2021; Misner & Carr, 2023).

Di bidang khusus hak anak, media sosial adalah saluran pemberdayaan pemuda, dan medan pertempuran penting untuk mempromosikan keselamatan berdasarkan desain di ruang digital. Seiring teknologi digital secara bertahap meresap ke pendidikan dini, interaksi sosial, dan identitas pribadi, gerakan yang dipimpin remaja dan organisasi advokasi anak beralih ke media sosial untuk mengkampanyekan perlindungan menyeluruh terhadap dampak teknologi. Proyek advokasi digital mengungkap banyak ancaman yang dihadapi anak-anak di dunia digital, termasuk perundungan siber, radikalisasi algoritmik, eksploitasi data predator, grooming online, dan meningkatnya media sintetis AI yang tidak disetujui (Oh et al., 2021; Ruler, 2020; Wanless & Berk, 2021). Aktivis anak melakukan kampanye yang terarah dengan menyerukan perusahaan internet dan badan legislatif untuk menerapkan standar desain yang sesuai usia, perlindungan privasi yang kuat, dan algoritma moderasi konten yang transparan yang mengutamakan kesejahteraan anak-anak di atas metrik keterlibatan komersial. Yang penting, advokasi media sosial berpendapat bahwa perlindungan anak tidak boleh mengorbankan hak dasar mereka atas informasi, kebebasan berekspresi, dan partisipasi sipil digital (Fraser, 2024; Kitagawa et al., 2023; Su et al., 2021). Advokasi digital bukan untuk mengadvokasi larangan besar-besaran yang meminggirkan anak muda atau menghalangi mereka belajar dan memobilisasi, tetapi untuk mempromosikan paradigma berbasis hak di mana anak muda diakui sebagai warga digital yang berpengetahuan, bukan subjek pasif. Aktivis muda menggunakan media sosial untuk memimpin kampanye global tentang perubahan iklim, advokasi kesehatan mental, dan literasi internet, menunjukkan bahwa anak muda dapat memberikan dampak besar pada kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka ketika mereka memiliki ruang online yang aman dan terkelola dengan baik. Advokasi media sosial memiliki kekuatan untuk kemajuan legislatif dengan mempertemukan para ahli keselamatan anak, politisi, dan pengusaha digital muda serta menciptakan generasi muda yang dapat *"menavigasi dunia digital dengan aman dan percaya diri"*.

Namun, di luar potensi revolusioner, aktivisme media sosial untuk perempuan dan anak-anak ada di ruang digital yang kompleks dengan cacat

struktural, resistensi sistemik, dan bahaya teknis yang muncul. Advokat hak perempuan, jurnalis perempuan, dan aktivis perlindungan anak sering menjadi sasaran kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi secara signifikan, termasuk doxxing, kampanye pelecehan terorganisir, shadowbanning terarah, dan manipulasi gambar deepfake, yang dirancang untuk membungkam aktivisme mereka dan mendiskreditkan mereka (Ienca & Vayena, 2020; Samuel et al., 2020; Servaes, 2022). Toksisitas yang terus-menerus ini, yang dipicu oleh algoritma platform yang terlalu sering menghargai sensasionalisme dan kemarahan daripada percakapan yang produktif, mengancam partisipasi suara-suara yang kurang terwakili dalam debat publik. Untuk mengatasi hambatan sistemik ini, kita harus melampaui moderasi konten individu menuju akuntabilitas platform struktural, tata kelola kolaboratif, dan regulasi yang ditegakkan. Aktivisme hak digital yang kompeten semakin menekan bisnis media sosial untuk menerapkan sistem safety-by-design, melakukan penilaian dampak hak asasi manusia yang ketat, dan memberikan transparansi algoritma penuh dalam praktik mereka dalam mempromosikan atau menekan konten. Selain itu, seiring teknologi kecerdasan buatan semakin umum, organisasi advokasi menuntut perlindungan hukum di seluruh dunia terhadap eksploitasi sintetis, produksi gambar tanpa persetujuan, dan pelanggaran privasi yang secara tidak proporsional merugikan perempuan dan anak-anak (McGowan, 2020; Mheidly & Fares, 2020). Kita perlu mengadopsi strategi dua arah untuk mencapai lingkungan digital yang benar-benar setara: mendidik perempuan dan remaja dengan pengetahuan digital yang kuat dan alat advokasi, serta menegakkan akuntabilitas hukum, teknologi, dan etika yang ketat di industri teknologi. Namun pada akhirnya, cara melindungi hak perempuan dan anak-anak di era digital adalah dengan mengubah media sosial dari ruang yang tidak terkendali menjadi ruang publik yang aman dan inklusif yang berakar pada hak-hak di mana setiap orang dapat memiliki suara tanpa takut akan pembalasan (Clark, 2020; Khan et al., 2022).

Pada dasarnya, arsitektur percakapan publik kontemporer telah bergeser dari fisik alun-alun kota, kafe, dan plaza kota ke ranah digital yang sangat terhubung dan didukung perangkat lunak. Ruang publik adalah konsep yang dikembangkan oleh teoritikus politik Jürgen Habermas dan secara historis berfungsi sebagai ranah perantara di mana warga sipil berkumpul untuk terlibat dalam debat rasional - kritis, mengembangkan opini publik bersama, dan menerapkan pemeriksaan demokratis yang diperlukan terhadap kekuatan politik dan ekonomi. Namun, tempat fisik konvensional ini dibatasi oleh kedekatan geografis, kerangka material, batas nasional, hambatan keuangan, dan pembatasan institusional yang ketat yang secara rutin meminggirkan sebagian orang. Media sosial telah meruntuhkan batas waktu dan ruang. Mereka telah membangun alun-alun publik digital

tanpa batas, asinkron, dan berskala hiper, di mana miliaran orang yang terhubung dapat berbagi ide, berdebat kebijakan, menantang struktur kekuasaan, dan mengorganisir aksi kolektif secara bersamaan tanpa hambatan bahasa atau budaya (Kim, 2021; Norris, 2023; Nyberg, 2021). Perubahan struktural ini merupakan perubahan besar dalam lingkungan komunikasi, dari model media siaran terpusat dan hierarkis abad kedua puluh menjadi lingkungan terdesentralisasi dan partisipatif dengan interaksi banyak-ke-banyak. Ruang digital, di mana alun-alun publik dibebaskan dari batasan kehadiran fisik dan lokasi geografis, ditandai dengan jaringan perhatian kolektif yang cair, penyebaran informasi yang cepat, dan keterlibatan sipil yang viral. Selain itu, ruang digital telah mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan pertunjukan publik, mengubah interaksi online yang sepele menjadi ruang keterlibatan sipil yang ada di mana-mana dan berkelanjutan (Bruns, 2021; Gaber & Fisher, 2022; Rovetta & Bhagavathula, 2020; Zulli & Zulli, 2022). Kini alat teknologi tersedia bagi masyarakat biasa, organisasi akar rumput, dan kelompok yang secara historis terpinggirkan untuk merekam ketidakadilan secara instan, melewati penjaga editorial tradisional, membangun opini publik dengan cepat melalui simbol jaringan seperti tagar, dan memberikan pengaruh politik revolusioner di panggung dunia. Dunia digital telah mengubah batas-batas kontak demokratis secara mendasar dan memperluas dimensi keterlibatan politik, mengubah konsumen media yang pasif menjadi pencipta, kurator, dan kritikus debat publik yang aktif (Chanana & Sangeeta, 2021; Nguyen et al., 2020; Waisbord, 2020).

Namun, gambaran positif media sosial sebagai ruang demokrasi utama secara fundamental dirusak oleh struktur privat yang berorientasi pada keuntungan yang mendukung platform-platform ini, sehingga menghasilkan kontradiksi struktural besar terhadap ruang publik yang diprivatisasi. Berbeda dengan barang publik nirlaba tradisional seperti taman kota, perpustakaan umum, atau alun-alun sipil, digital commons kontemporer dimiliki, diproduksi, dan diatur oleh korporasi teknologi dominan yang didorong oleh imperatif ekonomi kapitalisme platform dan pengawasan data. Platform-platform ini secara sistematis mengumpulkan perilaku manusia sebagai data mentah, yang, seperti yang dikemukakan para peneliti kapitalisme pengawasan, digunakan oleh algoritma prediktif bukan untuk memfasilitasi diskursus sipil yang terinformasi dan konsensus, melainkan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, manipulasi emosional, dan pendapatan iklan (Anggraini & Wulandari, 2021; Cheng & Jiang, 2022; Wang et al., 2020; Yarchi et al., 2021). Ekonomi perhatian dengan demikian secara otomatis mendorong sensasionalisme, kemarahan, clickbait, dan polarisasi ekstrem, merusak diskursus publik yang seimbang dan memecah ruang publik digital menjadi ruang gema yang bermusuhan dan gelembung filter ideologis

yang mengkorosi realitas empiris kolektif yang diperlukan untuk tata kelola demokratis. Ekosistem ini juga dirusak oleh botnet otomatis, amplifikasi algoritma berita provokatif, dan mikro-target politik yang bedah. Mereka mendistorsi sentimen sipil yang sebenarnya dan memecah komunitas demi keuntungan. Selain itu, hampir tidak ada akuntabilitas demokratis atas apa yang terjadi di ranah digital: eksekutif korporat, algoritma rekomendasi yang tidak transparan, dan prosedur moderasi konten otomatis bertindak sebagai hakim debat publik yang tidak terpilih. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuasaan tanpa regulasi atas visibilitas, shadowbanning, dan aksesibilitas platform dengan memberlakukan perjanjian syarat layanan eksklusif yang bertindak sebagai hukum konstitusional tidak resmi. Ini menunjukkan bagaimana wacana sipil modern terbatas pada paradigma pengawasan komersial di mana individu dipandang hanya sebagai sumber daya yang dimonetisasi (Azlan et al., 2020; Hodkinson, 2024; Lee et al., 2020).

Untuk memenuhi janji demokratis media sosial dan membangun ranah publik daring yang benar-benar adil, masyarakat harus memutuskan ketergantungan pada perusahaan kuat dan secara aktif membina infrastruktur digital yang tahan lama dan berkepentingan publik. Memulihkan digital commons akan membutuhkan campuran luas langkah regulasi yang tegas dan kemajuan teknologi penting, seperti transparansi algoritmik wajib, pengujian keamanan independen, portabilitas data, dan persyaratan interoperabilitas yang kuat untuk menghilangkan keterbatasan platform anti-persaingan. Lembaga regulasi seperti Digital Services Act Uni Eropa adalah langkah awal menuju pemulihan pengawasan publik. Namun transformasi sistemik nyata membutuhkan penerimaan platform komunikasi digital sebagai utilitas publik yang layak untuk kontrol demokratis. Tidak cukup hanya mengatur monopoli korporasi saat ini demi kesehatan demokrasi ruang publik digital yang berkelanjutan. Harus juga ada pengembangan ekosistem protokol terdesentralisasi dan sumber terbuka seperti Fediverse dan ActivityPub, yang berhasil memisahkan keterlibatan sosial publik dari praktik bisnis eksploitatif dan dominasi korporasi terpusat (Blank & Blank, 2020; Dubé et al., 2021; Self, 2021). Arsitektur terdesentralisasi mendemokratisasi tata kelola kepemilikan dan moderasi kepada komunitas pengguna federasi dan node lokal, memungkinkan pengelolaan algoritma kurasi secara demokratis, standar komunitas adaptif, dan kedaulatan data sejati. Ketika dikombinasikan dengan investasi publik yang berkelanjutan dalam pendidikan literasi media digital dan penciptaan ruang digital publik publik yang mirip dengan layanan penyiaran digital nirlaba dan perpustakaan publik digital yang sudah ada, langkah-langkah ini dapat secara sistematis mengubah keterlibatan digital dari kemarahan demi keuntungan menjadi kebenaran, inklusivitas, dan kesejahteraan sipil (Almeida et al., 2023; Habermas, 2022; Kemeny, 2025). Singkatnya, realisasi

media sosial sebagai forum publik memerlukan pengakuan konektivitas digital sebagai utilitas publik yang vital, yang sangat penting dalam perlindungan otonomi demokratis abad ke-21, pengetahuan komunal, dan kebebasan individu, bukan sekadar barang konsumen yang dapat dijual yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Basis data Scopus digunakan untuk pencarian lanjutan dengan kueri TITLE-ABS-KEY ("hak") DAN "advokasi" DAN "media sosial") SERTA SUBJAREA (SOCI) DAN DOCTYPE (ar) DAN LANGUAGE (Inggris) DAN PUBYEAR > 2019 DAN PUBYEAR < 2027 dan menghasilkan total 83 item. Analisis VOS Viewers ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3.

Network Analysis Vos Viewers
(Sumber: VOS Viewers Analysis)

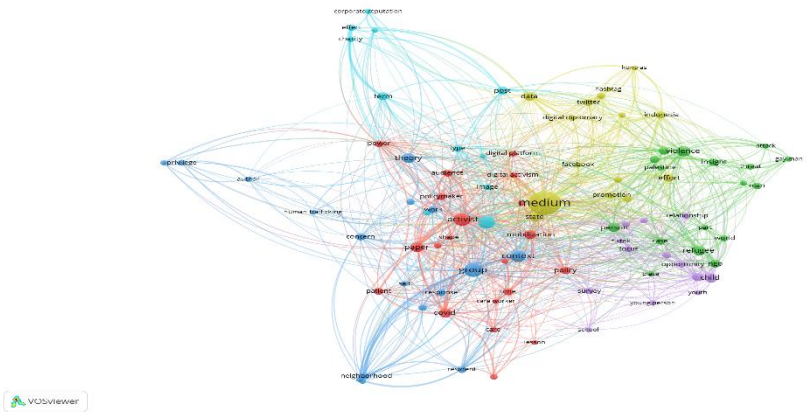


Diagram jaringan co-occurrence VOSviewer menggambarkan medan studi tema yang berpusat pada pusat utama yang ditetapkan sebagai medium, dikelilingi oleh node terkait termasuk hashtag, data, diplomasi digital, dan kekerasan. Kerangka dasar ini menunjukkan bahwa penelitian akademik saat ini terutama meneliti komunikasi daring melalui dinamika saluran yang menyeluruh dan tergeneralisasi. Dari titik inti ini berlanjut adalah agregasi demografis yang ringkas dengan kata-kata seperti perempuan, perempuan, anak, anak, keluarga, dan gender, menekankan kesejahteraan sosial dan kerentanan. Yang berdekatan dengan inti ini adalah klaster yang berpusat pada masalah institusional dan kebijakan

perlindungan, pencegahan, dan hak, sementara simpul periferal mencakup topik khusus mulai dari eksploitasi berat (perdagangan manusia, penyalahgunaan, kejahatan) hingga pembingkaian organisasi (reputasi bisnis, amal).

Meskipun cakupan luas di bidang-bidang ini, terdapat kekosongan teoretis yang jelas terkait keunikan platform dan komunikasi strategis. Literatur di dalam jaringan sering memandang saluran digital sebagai entitas tunggal, menggunakan terminologi luas seperti medium, sambil mengabaikan karakteristik platform yang memengaruhi efektivitas komunikasi. Selain itu, wacana akademik kontemporer terutama berfokus pada kebijakan, struktur hukum, dan hasil sistemik, sehingga menghasilkan kekurangan studi empiris yang mencolok mengenai kerumitan komunikasi publik digital, termasuk pembingkaian pesan, nada naratif, retorika visual, dan strategi keterlibatan audiens. Penelitian saat ini sering kali meneliti perempuan dan anak-anak sebagai entitas terpisah atau hanya melalui perspektif viktimisasi, daripada mengeksplorasi advokasi hak yang proaktif dan holistik.

Penelitian yang diusulkan langsung mengatasi kekurangan ini dan menunjukkan orisinalitas signifikan dengan istilah, "ANALISIS KOMPARATIF KOMUNIKASI PUBLIK DIGITAL UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI MEDIA SOSIAL X DAN IG. Studi ini membedah pusat media umum untuk menilai kerangka dialog X (Twitter) yang berpusat pada teks dan waktu nyata dalam kaitannya dengan lanskap visual, emosional, dan naratif di Instagram. Ini mengubah wacana akademis dari sekadar keberadaan saluran ke taktik komunikasi publik yang proaktif, mengintegrasikan segmen demografi, hukum, dan media yang berbeda di peta ke dalam struktur terpadu untuk advokasi hak kontemporer. Artikel ini mengusulkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana media sosial menggunakan platform komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak?

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi desain penelitian kualitatif deskriptif untuk meneliti pola komunikasi digital dan advokasi di berbagai institusi utama hak perempuan dan anak Indonesia. Data primer diambil langsung dari akun media sosial resmi di X (sebelumnya Twitter) dan Instagram milik empat entitas: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asosiasi LBH APIK, dan Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pengumpulan data dilakukan menggunakan ekstensi NCapture untuk Perangkat Lunak Analisis Data Kualitatif (Q-DAS) (Azeem et al., 2012; Bennett & Segerberg, 2023; Hilal & Alabri, 2013), menangkap postingan

publik, tweet, keterangan, tagar, dan metrik keterlibatan kontekstual dalam periode observasi tertentu. Dengan berfokus pada artefak digital utama ini, dataset mencerminkan pesan organisasi secara real-time, area fokus kebijakan, dan diskursus institusional mengenai isu gender dan perlindungan anak.

Pengolahan data kualitatif dan visualisasi tematik dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus Q-DAS (Leech & Onwuegbuzie, 2011; Vignato et al., 2022; Welsh, 2002). Analisis ini mengintegrasikan tiga fungsi analitis utama: pembuatan Word Cloud, analisis kueri Crosstab, dan analisis Klaster. Pertama, visualisasi Word Cloud yang berasal dari kueri frekuensi kata diterapkan untuk mengidentifikasi kata kunci frekuensi tinggi dan tema emergen di seluruh dataset. Kedua, analisis Crosstab diterapkan untuk memeriksa silang frekuensi node di empat akun organisasi dan dua platform media sosial (X vs. Instagram), menyoroti variasi penekanan tematik dan prioritas institusional. Terakhir, Analisis Klaster digunakan untuk menghitung koefisien korelasi Pearson dan menghasilkan dendrogram, mengungkap kedekatan semantik dan struktur relasional antar sub-tema, node, dan narasi akun. Secara gabungan, teknik Q-DAS ini memberikan evaluasi kualitatif sistematis dan multi-dimensi terhadap strategi komunikasi digital institusional.

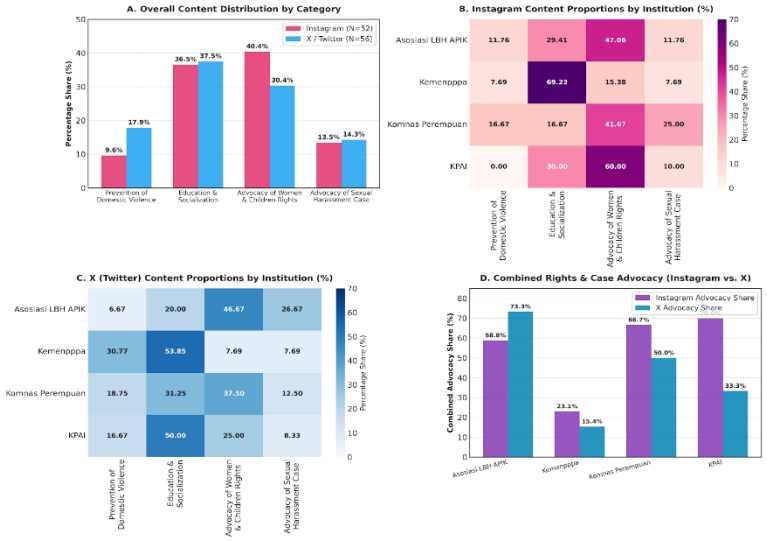
HASIL DAN DISKUSI

Dalam analisis yang dibagi dalam dua bagian analisis ini, adalah; Pertama, analisis Dikotomi Konten komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial. Kedua, analisis adalah jenis komunikasi publik untuk mengadvokasi perempuan dan hak anak di platform media sosial. Ketiga, analisis indikator komunikasi publik digital untuk mengadvokasi perempuan dan hak anak di platform media sosial. Keempat analisis narasi komunikasi publik digital untuk memperjuangkan perempuan dan hak anak di platform media sosial. Analisis dijelaskan sebagai:

a. Analisis Dikotomi Konten komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial

Analisis ini diharapkan dapat menjelaskan dikotomi konten komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial dari spesifik di X dan Instagram. Analisis pada gambar 4 dan table 1.

Gambar 4
Dikotomi Konten di Media Sosial tentang perempuan dan hak-hak anak
(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)



Tabel 3.
Dikotomi Konten di Media Sosial tentang perempuan dan hak-hak anak

Kategori Konten	Instagram	X / Twitter
Advokasi Hak Perempuan & Anak	40.38%	30.36%
Pendidikan dan Sosialisasi	36.54%	37.50%
Pencegahan KDRT	9.62%	17.86%
Advokasi Kasus Pelecehan Seksual	13.46%	14.29%

(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)

Analisis empiris dataset Instagram mengungkapkan ruang publik digital yang didominasi oleh advokasi hak struktural dan kampanye edukasi top-down di N = 52 postingan dari empat institusi utama kesetaraan gender dan perlindungan anak di Indonesia. Advokasi Hak Perempuan dan Anak merupakan kategori konten terbesar di Instagram, menyumbang 40,38% dari seluruh aktivitas platform, diikuti oleh Pendidikan dan Sosialisasi sebesar 36,54%. Sebaliknya, penanganan langsung kasus untuk Advokasi Kasus Pelecehan Seksual mencakup 13,46%, sementara Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mewakili 9,62% dari total konten platform. Rincian institusional menyoroti pembagian yang jelas dalam prioritas operasional: Kemenppa memusatkan 69,23% jejak Instagram-nya pada

sosialisasi pendidikan luas dan pengumuman kebijakan, sedangkan pelaku bantuan hukum non-pemerintah seperti Asosiasi LBH APIK mendedikasikan 47,06% output mereka untuk advokasi hak perempuan dan anak-anak. Badan pengawas resmi menunjukkan mandat yang terfokus, dengan KPAI mendedikasikan 60,00% postingan Instagram-nya untuk kerangka perlindungan hak anak dan Komnas Perempuan mencatat proporsi advokasi kasus pelecehan seksual aktif tertinggi di platform tersebut yaitu 25,00%. Angka dasar ini menunjukkan bahwa grid visual Instagram yang persisten, format komidi putar, dan kurasi algoritmik estetika secara alami mendorong institusi untuk membangun deklarasi hak yang matang dan panjang serta kesadaran kampanye resmi daripada melakukan intervensi krisis cepat atau manajemen kasus hukum yang dipersonalisasi.

Pemeriksaan paralel terhadap dataset X (sebelumnya Twitter) di N = 56 postingan menunjukkan pergeseran tematik yang jelas menuju penyuluhan edukasi waktu nyata, kecepatan percakapan, dan intervensi berorientasi krisis. Di X, Pendidikan dan Sosialisasi muncul sebagai kategori konten terdepan secara keseluruhan dengan 37,50%, diikuti oleh Advokasi Hak Perempuan dan Anak sebesar 30,36%, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebesar 17,86%, dan Advokasi Kasus Pelecehan Seksual sebesar 14,29%. Arsitektur mikroblogging berbasis teks dari X memungkinkan organisasi menyesuaikan pesan mereka dengan siklus berita waktu nyata, diskusi publik yang sedang tren, dan mekanisme dukungan darurat penyintas. Asosiasi LBH APIK memperluas advokasi kasus pelecehan seksualnya menjadi 26,67% di X lebih dari dua kali lipat proporsi Instagramnya dengan memanfaatkan kemampuan tweet kutipan dan penandaan langsung platform untuk membangun akuntabilitas publik di sekitar proses hukum yang aktif. Demikian pula, Kemenpppa meningkatkan konten pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dari 7,69% di Instagram menjadi 30,77% di X, menggunakan thread teks real-time untuk menyebarkan informasi hotline darurat, hak hukum, dan protokol keselamatan penyintas. Badan hukum juga memodifikasi output mereka, dengan KPAI beralih dari kampanye visual yang berfokus pada hak di Instagram menjadi memprioritaskan pendidikan dan sosialisasi (50,00%) serta kesadaran kekerasan dalam rumah tangga (16,67%) dalam lingkungan percakapan X.

Perbandingan data gabungan di kedua saluran media sosial (N = 108 postingan) menyoroti bagaimana kemampuan platform secara aktif membentuk strategi komunikasi organisasi, pembingkaian diskursus publik, dan prioritas konten. Sementara edukasi publik tetap sangat konsisten di berbagai platform (36,54% di Instagram dibandingkan 37,50% di X), advokasi hak struktural turun dari 40,38% di Instagram menjadi 30,36% di X, mencerminkan bagaimana deklarasi hukum bentuk panjang lebih selaras dengan format grafik visual Instagram. Sebaliknya, pesan kekerasan dalam rumah tangga hampir dua kali lipat dari 9,62% di Instagram menjadi 17,86% di X, membuktikan bahwa microblogging berbasis

teks lebih disukai untuk panduan keselamatan domestik mendesak, jangkauan penyintas secara real-time, dan debat kebijakan percakapan. Penyelarasan institusional lintas platform menunjukkan bahwa bantuan hukum non-pemerintah mencapai advokasi gabungan yang lebih tinggi (hak dan advokasi kasus) di X (73,34%) dibandingkan di Instagram (58,82%), karena jaringan waktu nyata lebih mendukung mobilisasi hukum aktif dan solidaritas publik. Di sisi lain, komisi statutori seperti KPAI (70,00% IG vs 33,33% X) dan Komnas Perempuan (66,67% IG vs 50,00% X) mencapai advokasi gabungan yang lebih tinggi di Instagram, di mana slide visual secara efektif mengkomunikasikan posisi kebijakan formal, laporan pelacakan legislatif, dan kerangka pemantauan statutori.

Mengevaluasi entitas-entitas ini melalui lensa kelembagaan mengungkapkan perbedaan struktural yang mendalam antara otoritas pemerintah eksekutif, komisi pengawas statutori independen, dan organisasi hukum masyarakat sipil garis depan. Kemenpppa beroperasi terutama sebagai pendidik eksekutif top-down, mengalokasikan 69,23% postingan Instagram dan 53,85% tweet X-nya untuk sosialisasi kebijakan, sambil mempertahankan keterlibatan minimal dalam advokasi kasus aktif (7,69% di kedua platform) untuk menghindari konflik sub-judice dengan badan yudisial dan penegak hukum. Sebaliknya, Asosiasi LBH APIK berfungsi sebagai penyedia bantuan hukum masyarakat sipil yang berorientasi tindakan, dengan fokus besar pada pembelaan hak (47,06% IG / 46,67% X) dan memperluas intervensi kasus aktif di X (26,67%) untuk berfungsi sebagai meja penerimaan digital terbuka bagi para penyintas. Komnas Perempuan menempati posisi pemantauan yang penting, menjaga cakupan seimbang di antara advokasi hak (41,67% IG / 37,50% X), kasus pelecehan seksual aktif (25,00% IG / 12,50% X), dan kekerasan dalam rumah tangga (16,67% IG / 18,75% X) untuk menjembatani reformasi kebijakan parlemen dengan realitas penyintas garis depan. Sementara itu, KPAI beralih dari advokasi hak anak secara visual di Instagram (60,00%) ke edukasi publik percakapan di X (50,00%), menggambarkan bagaimana mandat organisasi menentukan keterlibatan publik spesifik platform di lingkungan digital.

Sintesis data mengungkap kesenjangan komunikasi kritis, gesekan algoritmik, dan jalur yang dapat ditindaklanjuti untuk strategi digital institusional terintegrasi di seluruh jaringan hak asasi manusia Indonesia. Defisit empiris paling menonjol di kedua platform adalah kurangnya representasi relatif dari pesan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (13,89% secara gabungan), meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk utama kekerasan berbasis gender dalam pelaporan peradilan nasional. Untuk menjembatani kesenjangan struktural ini, institusi harus menyelaraskan format konten dengan insentif algoritmik: akun Instagram harus mengubah prosedur hukum yang kompleks menjadi panduan karusel yang dapat disimpan dan video reel untuk memaksimalkan distribusi algoritmik, sementara akun X harus menggunakan

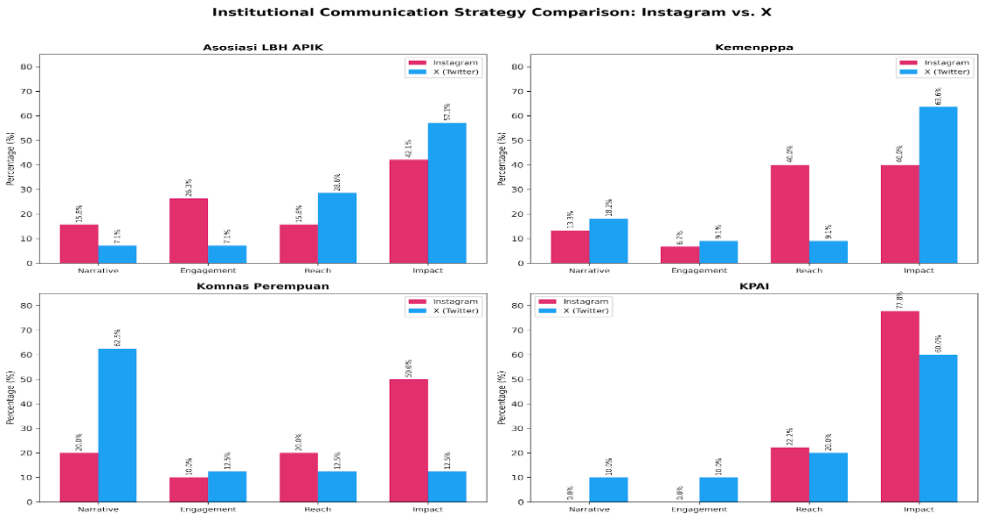
thread multi-tweet yang langsung menandai lembaga penegak hukum guna mempercepat akuntabilitas hukum publik. Selain itu, badan eksekutif seperti Kemenpppa dan penyedia hukum masyarakat sipil seperti LBH APIK harus membangun alur kerja rujukan digital formal yang menghubungkan pelaporan media sosial publik langsung ke hotline darurat negara bagian resmi seperti SAPA 129. Dengan menggabungkan alur kerja konten yang disesuaikan dengan platform dengan dasbor pelacakan kasus bulanan yang transparan dan menjaga privasi, organisasi hak asasi Indonesia dapat mengoptimalkan ruang publik digital, memastikan akses yang adil ke perlindungan hukum, dan mengubah advokasi media sosial online menjadi keadilan nyata bagi para penyintas.

b. Analisis jenis komunikasi publik komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial

Analisis ini diharapkan dapat menjelaskan jenis komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial secara spesifik di X dan Instagram. Analisis pada gambar 4 dan tabel 2.

Gambar 4.
Jenis komunikasi publik advokat perempuan dan hak-hak anak di platform media sosial

(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)



Tabel 2.
Jenis komunikasi publik advokat perempuan dan hak-hak anak di platform media sosial

Entitas / Institusi	Platform	Content Impact	Content Output & Reach	Narrative & Perception	Engagement & Interaction
Rata-rata Keseluruhan (Dataset)	Instagram	49.06%	24.53%	13.21%	13.21%
Rata-rata Keseluruhan (Dataset)	X (Twitter)	45.10%	17.65%	27.45%	9.80%
Asosiasi LBH APIK	Instagram	42.11%	15.79%	15.79%	26.32%
Asosiasi LBH APIK	X (Twitter)	57.14%	28.57%	7.14%	7.14%
Kemenpppa	Instagram	40.00%	40.00%	13.33%	6.67%
Kemenpppa	X (Twitter)	63.64%	9.09%	18.18%	9.09%
Komnas Perempuan	Instagram	50.00%	20.00%	20.00%	10.00%
Komnas Perempuan	X (Twitter)	12.50%	12.50%	62.50%	12.50%
KPAI	Instagram	77.78%	22.22%	0.00%	0.00%
KPAI	X (Twitter)	60.00%	20.00%	10.00%	10.00%

(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)

Evaluasi empiris kinerja komunikasi institusional di Instagram, yang diambil dari dataset, mengungkapkan ruang publik digital yang sebagian besar berorientasi pada presentasi dampak institusional dan konten yang disiarkan di empat entitas utama perlindungan gender dan anak Indonesia. Di seluruh postingan yang dianalisis di Instagram, Content Impact merupakan kategori operasional tunggal terbesar dengan 49,06%, diikuti oleh Content Output & Reach sebesar 24,53%, sementara Narrative & Perception dan Engagement & Interaction memperoleh pangsa yang lebih rendah dan identik masing-masing sebesar 13,21%. Metrik kinerja institusional menunjukkan model operasional yang berbeda yang dibentuk oleh fungsi organisasi dan mekanisme platform. Penyedia pembelaan hukum non-pemerintah Asosiasi LBH APIK mencatat proporsi Engagement & Interaction di Instagram tertinggi sebesar 26,32% lebih dari dua kali lipat badan

negara mana pun, yaitu 42,11% dalam Content Impact, 15,79% dalam Narrative & Perception, dan 15,79% dalam Content Output & Reach. Hal ini mencerminkan orientasi masyarakat sipil akar rumput LBH APIK, memanfaatkan alat interaktif Instagram untuk menjaga hubungan dialogis langsung dengan para penyintas dan pencari hukum. Kementerian eksekutif negara Kemenpppa membagi sebagian besar jejak Instagram-nya secara merata antara Content Output & Reach (40,00%) dan Content Impact (40,00%), sementara mengalokasikan 13,33% untuk Narrative & Perception dan minimal 6,67% untuk Engagement & Interaction. Badan independen yang diatur oleh undang-undang menunjukkan pola komunikasi yang terfokus: Komnas Perempuan mengalokasikan 50,00% kontennya untuk Content Impact, seimbang dengan 20,00% pangsa yang sama di Narrative & Perception dan Content Output & Reach, serta 10,00% di Engagement & Interaction. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan fokus ekstrem pada Instagram, mengalokasikan 77,78% outputnya untuk Content Impact dan 22,22% untuk Content Output & Reach, sementara mencatat nol mutlak (0,00%) di Narrative & Perception dan Engagement & Interaction. Metrik ini menunjukkan bahwa fitur grid visual dan carousel gambar Instagram yang persisten terutama digunakan sebagai papan penerbitan digital untuk pencapaian undang-undang, pengumuman resmi, dan pelaporan dampak organisasi, bukan sebagai forum interaktif untuk keterlibatan komunitas.

Analisis kuantitatif paralel dari dataset X (sebelumnya Twitter) mengungkapkan realokasi tematik besar dari sumber daya digital outreach di institusi identik yang beroperasi dalam ekosistem mikroblogging yang bergerak cepat. Metrik agregat di X menunjukkan bahwa Content Impact tetap menjadi kategori terdepan secara keseluruhan sebesar 45,10%, tetapi Narrative & Perception mengalami ekspansi signifikan menjadi 27,45%, sementara Content Output & Reach turun menjadi 17,65% dan Engagement & Interaction menyusut menjadi 9,80%. Perubahan institusional paling mencolok terjadi di Komnas Perempuan, yang mengalokasikan ulang 62,50% seluruh strategi platformnya ke Narrative & Perception on X, sementara mengurangi Content Impact, Content Output & Reach, dan Engagement & Interaction menjadi bagian kecil yang sama yaitu 12,50% masing-masing. Perubahan struktural besar ini menunjukkan bagaimana Komnas Perempuan memanfaatkan arsitektur berbasis teks, mekanik kutipan-tweet, dan dinamika thread X untuk bertindak sebagai penetap agenda kebijakan secara real-time, membentuk narasi hukum dan membimbing persepsi publik selama debat legislatif penting tentang kekerasan berbasis gender. Badan eksekutif Kemenpppa juga memodifikasi jejaknya di X, meningkatkan Content Impact menjadi dominan sebesar 63,64%—tertinggi di kedua platform—sambil mengurangi Output & Jangkauan Konten menjadi 9,09%, bersama 18,18% di Narrative & Perception dan 9,09% di Engagement & Interaction. Penyedia masyarakat sipil Asosiasi LBH APIK memusatkan 57,14% komunikasi X-nya pada Content Impact dan 28,57% pada Content Output & Reach, sementara mencatat pangsa yang lebih kecil di

Narrative & Perception (7,14%) dan Engagement & Interaction (7,14%). Akhirnya, badan perlindungan anak KPAI memperluas repertoarnya di X dengan memperkenalkan 10,00% di Narrative & Perception dan 10,00% di Engagement & Interaction, melepas dari keberadaan nol di kategori ini di Instagram, sambil mempertahankan 60,00% di Content Impact dan 20,00% di Content Output & Reach. Metrik ini menunjukkan bahwa X berfungsi terutama sebagai arena gesit untuk pembingkaian narasi real-time, notifikasi krisis cepat, dan penempatan kebijakan berdampak tinggi.

Perbandingan metrik dataset di kedua saluran media sosial menunjukkan bagaimana kemampuan teknis spesifik platform secara aktif membentuk ulang strategi komunikasi organisasi dan dinamika keterlibatan audiens. Kontras lintas platform paling signifikan terjadi pada Narrative & Perception, yang meningkat dari 13,21% di Instagram menjadi 27,45% di X, lebih dari dua kali lipat komposisi relatif di seluruh sampel. Lonjakan struktural ini menyoroti bagaimana lingkungan microblogging berbasis teks lebih mengutamakan posisi diskursif, pembingkaian ideologis, dan komentar langsung dibandingkan media visual. Sebaliknya, Content Output & Reach menyusut dari 24,53% di Instagram menjadi 17,65% di X, menunjukkan bahwa carousel visual multi-slide dan deck infografis di Instagram berfungsi sebagai saluran yang lebih efektif untuk distribusi edukasi yang luas dan jangkauan kampanye formal. Engagement & Interaction mengalami penurunan ringan secara keseluruhan dari 13,21% di Instagram menjadi 9,80% di X, mengungkap tantangan institusional yang meluas di mana entitas secara konsisten memprioritaskan pesan gaya siaran dibandingkan konsultasi komunitas aktif. Sementara itu, Content Impact menunjukkan daya tahan struktural di kedua media, mempertahankan 49,06% di Instagram dan 45,10% di X. Stabilitas ini menegaskan bahwa terlepas dari variasi algoritmik atau format antarmuka, keempat organisasi memusatkan kehadiran digital mereka pada menunjukkan hasil institusional yang konkret, pencapaian advokasi kebijakan, dan mandat perlindungan publik. Namun, perbedaan tajam dalam cara badan individu menerapkan saluran ini seperti fokus narasi Komnas Perempuan pada X dibandingkan fokus outreach Kemenppa pada Instagram menunjukkan pendekatan komunikasi yang tidak terkoordinasi dan terisolasi platform di seluruh sektor negara bagian dan masyarakat sipil.

Menganalisis profil komunikasi digital ini melalui lensa tata kelola institusional menyoroti perbedaan struktural mendasar yang memisahkan kementerian pemerintah eksekutif, komisi statutori independen, dan badan pembela hukum non-pemerintah garis depan. Sebagai otoritas pemerintah eksekutif, Kemenpppa beroperasi di bawah protokol administratif resmi, menghasilkan postur siaran top-down di Instagram di mana Content Output & Reach (40,00%) dan Content Impact (40,00%) mendominasi, sementara interaksi langsung komunitas tetap terbatas pada 6,67%. Di X, Kemenpppa beralih menjadi penyiar dampak resmi (63,64% Content Impact), menggunakan pesan real-time untuk

mengumumkan tindakan eksekutif dan kerangka kebijakan daripada terlibat dalam dialog publik terbuka. Sebaliknya, aktor non-pemerintah Asosiasi LBH APIK menjalankan model pembelaan hukum berorientasi tindakan, mencapai tingkat Engagement & Interaction tertinggi di Instagram (26,32%) dengan menjaga saluran komunikasi dua arah yang mudah diakses dengan penyintas dan advokat akar rumput. Pada X, LBH APIK mengarahkan kembali ke akuntabilitas hukum berdampak tinggi (57,14% Dampak Konten dan 28,57% Output & Jangkauan Konten), memanfaatkan postingan publik untuk menyoroti kasus aktif dan mendorong upaya hukum. Badan independen yang diundang-undang menampilkan peran khusus: Komnas Perempuan berfungsi sebagai pengusaha norma, memanfaatkan Instagram untuk pelaporan dampak seimbang (50,00% Dampak Konten) sambil menerapkan X sebagai mesin narasi strategis (62,50% Narasi & Persepsi) untuk mendorong reformasi parlemen dan peradilan. Sementara itu, KPAI mempertahankan sikap administratif paling formal, dengan fokus besar pada dampak dan jangkauan hukum di Instagram (77,78% Dampak Konten / 22,22% Jangkauan) tanpa keterlibatan interaktif, sebelum mengadopsi sikap yang sedikit lebih luas pada X (60,00% Dampak, 20,00% Jangkauan, 10,00% Narasi, 10,00% Keterlibatan). Profil-profil yang berbeda ini menegaskan bahwa status hukum organisasi, mandat institusional, dan budaya administratif menentukan pemanfaatan platform serta strategi keterlibatan publik digital.

Untuk mengatasi hambatan komunikasi sistemik, menghilangkan penyiaran terisolasi platform, dan mengoptimalkan keterlibatan publik digital di seluruh institusi kesetaraan gender dan perlindungan anak Indonesia, peta jalan strategis yang komprehensif dan bertahap harus diterapkan di komunikasi negara dan masyarakat sipil. Defisit empiris utama yang diidentifikasi di kedua dataset adalah penekanan terus-menerus terhadap Engagement & Interaction, yang rata-rata hanya 13,21% di Instagram dan 9,80% di X, ditambah ketidakseimbangan struktural yang parah seperti kurangnya narasi dan keterlibatan KPAI di Instagram (0,00%) dan interaksi komunitas minimal Kemenppa di kedua saluran (6,67% di IG dan 9,09% di X). Menjembatani kesenjangan struktural ini membutuhkan pergeseran paradigma mendasar dari penyebaran informasi satu arah ke model keterlibatan publik interaktif bertingkat yang memanfaatkan kemampuan spesifik platform untuk mengubah output digital menjadi perlindungan sosial yang nyata. Entitas negara eksekutif seperti Kemenpppa dan komisi resmi seperti KPAI dan Komnas Perempuan harus membentuk meja triase digital dan konsultasi publik yang berstaf profesional untuk memantau secara sistematis bagian komentar, saluran pesan langsung, dan penyebutan publik. Alih-alih memperlakukan akun media sosial sebagai papan buletin administratif statis, institusi-institusi ini harus mengubah pertanyaan publik yang masuk menjadi rujukan hukum aktif, kontak dukungan darurat yang terverifikasi, dan pengajuan kasus langsung, mengikuti model interaktif akar rumput yang didemonstrasikan oleh Asosiasi LBH APIK, yang mencapai tingkat Keterlibatan & Interaksi terkemuka sebesar 26,32% di

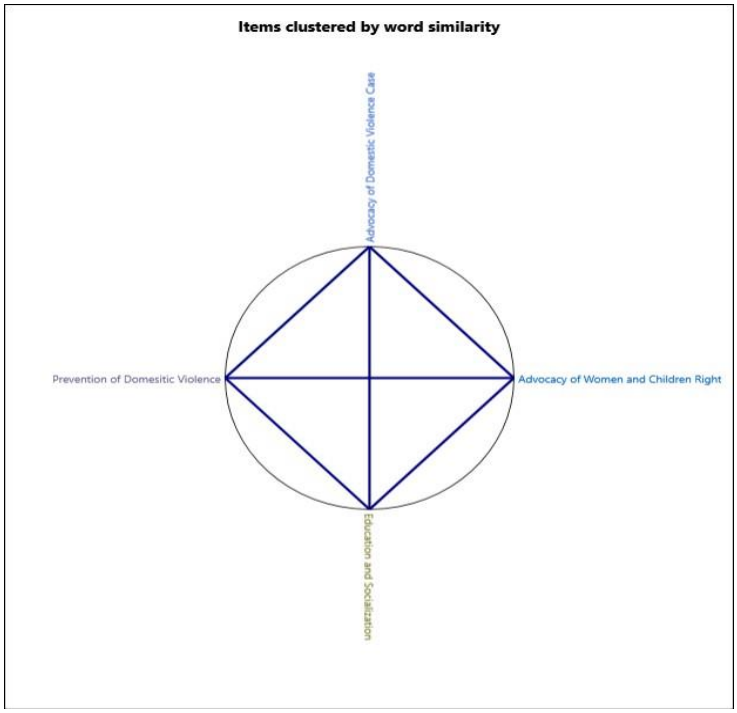
Instagram. Di Instagram, institusi harus merancang ulang jalur distribusi konten mereka untuk beralih dari selebaran grafis statis dan blok teks padat menuju karusel visual dinamis, dek edukasi multi-halaman yang dapat disimpan, dan gulungan video pendek yang menyederhanakan proses legislatif kompleks, hak korban, dan mekanisme perlindungan. Dengan memanfaatkan preferensi algoritmik Instagram untuk waktu tinggal, tingkat penyimpanan, dan berbagi pesan langsung, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan Output & Jangkauan Konten (saat ini 24,53% secara keseluruhan) dan retensi publik jangka panjang. Di X, institusi harus memanfaatkan kecepatan percakapan tinggi dan mekanisme berpusat pada teks platform untuk membangun alur kerja penetapan agenda yang terstruktur. Penerapan Narrative & Perception on X yang sukses oleh Komnas Perempuan (62,50%) menjadi tolok ukur operasional teladan bagaimana badan hukum dapat memanfaatkan thread penjelasan multi-tweet, sesi tanya jawab langsung, komentar acara legislatif secara real-time, dan penandaan langsung komite parlemen serta pemangku kepentingan penegak hukum untuk memengaruhi debat kebijakan publik dan mempercepat akuntabilitas hukum selama acara nasional yang krusial. Selain itu, sinergi antar-institusi harus dibangun melalui protokol rujukan digital formal yang menghubungkan penyedia hukum masyarakat sipil seperti Asosiasi LBH APIK secara langsung dengan hotline eksekutif negara bagian seperti SAPA 129 Kemenppa dan badan pemantauan statutori. Ekosistem lintas platform terintegrasi ini akan memastikan bahwa kasus publik yang diidentifikasi di platform terbuka seperti X, di mana LBH APIK mencapai Dampak Konten 57,14% dan Output & Jangkauan Konten 28,57%, diarahkan secara mulus ke sistem penerimaan hukum resmi dan layanan perlindungan negara tanpa gesekan birokrasi. Untuk memastikan akuntabilitas berkelanjutan dan penyempurnaan programatik, institusi harus memperkenalkan dasbor dampak digital bulanan yang menjaga privasi yang melaporkan secara transparan kasus yang telah diselesaikan, pengajuan kebijakan, dan intervensi darurat, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan mengubah pengikut digital pasif menjadi peserta aktif dan terinformasi dalam infrastruktur perlindungan hak asasi manusia Indonesia yang lebih luas. Pada akhirnya, dengan menyelaraskan mekanisme platform teknis dengan mandat institusional, badan publik Indonesia akan melampaui penyiaran tingkat permukaan, membongkar silo komunikasi digital, dan membangun ruang publik yang tangguh dan sangat responsif yang mampu memberikan keadilan dan keselamatan yang terukur bagi perempuan dan anak-anak rentan di seluruh kepulauan.

c. Analisis Indikator Korelasi tentang komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial

Analisis ini diharapkan dapat menjelaskan korelasi komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial khususnya di X dan Instagram. Analisis pada gambar 5 dan tabel 3.

Gambar 5.
Indikator korelasi tentang komunikasi publik advokat, perempuan, dan hak anak di platform media sosial

(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)



Tabel 3.
Indikator korelasi tentang komunikasi publik advokat, perempuan, dan hak anak di platform media sosial

Indikator A	Indikator B	Koefisien korelasi Pearson
Pencegahan Kekerasan Domesitik	Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0.956628
Advokasi Hak Perempuan dan Anak	Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0.907961
Pencegahan Kekerasan Domesitik	Advokasi Hak Perempuan dan Anak	0.907381
Pendidikan dan Sosialisasi	Advokasi Hak Perempuan dan Anak	0.906276
Pencegahan Kekerasan Domesitik	Pendidikan dan Sosialisasi	0.897538
Pendidikan dan Sosialisasi	Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0.863103

(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)

Evaluasi kuantitatif model dikotomi konten bergantung pada pengukuran asosiasi struktural lintas dimensi kategorial sambil menegakkan kondisi batas yang ketat untuk mempertahankan validitas empiris. Dalam konteks dataset yang disediakan, kerangka dikotomi konten mengevaluasi hubungan antar empat indikator inti institusional dan advokasi: Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Advokasi Hak Perempuan dan Anak, serta Pendidikan dan Sosialisasi. Analisis beroperasi dalam koridor parameter yang telah ditentukan sebelumnya yang ditentukan oleh batas bawah () dan batas atas (). Menetapkan batas bawah 0,70 menetapkan ambang minimum yang ketat untuk signifikansi statistik dan konstruksi keandalan, memastikan bahwa semua pasangan yang dianalisis mencerminkan keterkaitan yang kuat dan bermakna sambil menyaring noise korelasi rendah, fluktuasi stokastik yang kurang informatif, dan keterkaitan tematik yang lemah. Secara bersamaan, batas atas 1,00 mewakili batas teoretis asosiasi linier positif sempurna, yang sesuai dengan penyelarasan deterministik absolut atau kovariansi unit lengkap antar indikator. Dengan membatasi ruang evaluasi secara ketat dalam interval tersebut, kerangka empiris mengisolasi konvergensi tematik yang sangat kuat, memungkinkan pemetaan geometris yang presisi dan evaluasi komparatif tentang bagaimana tindakan pencegahan, advokasi hukum, intervensi berbasis hak, dan sosialisasi pendidikan terjadi berdampingan dan secara sistematis saling memperkuat dalam kerangka konten masyarakat yang kompleks.$LL = 0.70 UL = 1.00 [0.70, 1.00]$

Pemeriksaan koefisien korelasi Pearson empiris mengungkapkan ketergantungan antar-indikator yang sangat kuat di semua enam kombinasi berpasangan, dengan koefisien berkisar dari minimum 0,8631 hingga puncak 0,9566, sehingga tetap sepenuhnya berada di dalam yang ditentukan dengan batas atas adalah 1 dan batas bawah adalah 0,7 koridor ambang. Korelasi terkuat yang diamati terdapat antara Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menunjukkan bahwa langkah pencegahan proaktif dan advokasi hukum reaktif beroperasi dalam sinergi hampir sempurna di lingkungan institusional. Korelasi hampir kesatuan ini menunjukkan bahwa kampanye institusional dan inisiatif konten yang menangani kekerasan dalam rumah tangga tidak memperlakukan pencegahan dan manajemen kasus sebagai dikotomi terpisah, melainkan sebagai pilar yang saling bergantung dari strategi operasional terpadu. Setelah pasangan dominan ini, Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan korelasi yang sangat tinggi dengan Advokasi Hak Perempuan dan Anak sebesar 0.9080, sementara Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan korelasi yang hampir identik dengan Advokasi Hak Perempuan dan Anak dengan 0.9074. Selain itu, Pendidikan dan Sosialisasi memiliki korelasi substansial dengan Advokasi Hak Perempuan dan Anak 0.9062 yang menunjukkan bahwa kerangka kerja berbasis hak yang lebih luas berfungsi sebagai nexus struktural sentral yang menghubungkan program kesadaran pendidikan langsung dengan strategi advokasi dan penanganan kasus khusus di berbagai institusi.

Selain keterkaitan berbasis hak primer, kontinuitas struktural model dikotomi konten semakin dibuktikan oleh interaksi pasangan yang tersisa yang melibatkan pendidikan umum dan sosialisasi. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat berkorelasi dengan Pendidikan dan Sosialisasi pada 0,8975, menegaskan peran penting pendidikan publik dan sosialisasi komunitas dalam membangun mekanisme pencegahan kekerasan jangka panjang di seluruh demografi target. Koefisien korelasi terendah dalam matriks terbatas terjadi antara Pendidikan dan Sosialisasi dan Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan 0,8631. Meskipun nilai ini mewakili batas bawah distribusi empiris dataset, nilai ini masih dengan nyaman melampaui batas batas bawah sebesar 0,70 x 0,1631 poin, menegaskan bahwa bahkan hubungan paling tidak langsung dalam jaringan mempertahankan koherensi statistik yang kuat dan validitas operasional. Pengelompokan ketat semua nilai korelasi dalam pita sempit 0,0935 poin (antara 0,8631 dan 0,9566) menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi di seluruh ruang dikotomi konten. Kekompakan struktural ini menunjukkan bahwa tidak ada satu indikator tunggal yang berfungsi sebagai pulau terisolasi; sebaliknya, keempat kategori membentuk jaringan yang sangat terintegrasi di mana perubahan strategis atau alokasi sumber daya dalam satu domain secara sistematis bervariasi dengan hasil di tiga domain lainnya.

Visualisasi empiris yang disajikan dalam gambar komposit yang menyertai

memberikan perspektif analitik ganda pada ruang dikotomi konten terbatas ini melalui heatmap matriks korelasi dan grafik batang berpasangan yang diurutkan. Pada Panel A, heatmap matriks korelasi memetakan matriks simetris lengkap dari empat indikator, menggunakan gradien warna yang diskalakan ketat antara batas bawah 0,70 (kuning muda) dan batas atas 1 (biru tua tua). Elemen diagonal mencerminkan korelasi diri pada satuan dengan r adalah 1 , sementara sel off-diagonal menampilkan koefisien korelasi empat desimal yang tepat, secara visual menekankan klaster padat hubungan bernilai tinggi di semua pasangan kategori. Pada Panel B, grafik batang horizontal yang diurutkan mengurutkan enam hubungan indikator berpasangan berdasarkan kekuatan menurun, dengan jelas menggambarkan gradien asosiasi dari pendorong utama (Prevention & Advocacy DV Case at dengan 0,9566 hingga baseline dasar (Education & Advocacy DV Case di 0,8631). Dengan secara eksplisit menetapkan batas sumbu horizontal menjadi 0,7 dan 1,00, angka ini secara visual memperkuat ambang batas bawah teoretis, memungkinkan peneliti untuk secara instan membedakan baik hierarki relatif maupun kekuatan absolut setiap kopling antar-indikator tanpa distorsi dari nilai kisaran bawah yang tidak relevan.

Secara ringkas, analisis dikotomi konten terbatas menunjukkan bahwa strategi institusional untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, advokasi hak, dan pendidikan komunitas beroperasi sebagai ekosistem yang sangat kohesif dan saling bergantung daripada inisiatif yang terfragmentasi dan saling bersaing. Penerapan batas bawah adalah 0,7 dan batas atas adalah batas 1, memvalidasi bahwa setiap pasangan konstituen memenuhi kriteria ketat untuk keandalan empiris, membuktikan bahwa sosialisasi pendidikan, perlindungan hak, advokasi kasus, dan pencegahan kekerasan berbagi nilai variansi bersama antara 74,5% hingga 91,5% antara 0,7449 hingga 0,9151. Dari perspektif kebijakan dan manajemen strategis, temuan empiris ini menyiratkan bahwa intervensi sosial tidak dapat dilaksanakan secara efektif secara terpisah; memperluas pendidikan publik dan sosialisasi secara inheren memperkuat advokasi hak dan pencegahan kekerasan, sementara advokasi kasus yang berdedikasi memberikan dukungan struktural yang diperlukan untuk tujuan pencegahan yang lebih luas. Model empiris terpadu dan diagnostik visual yang menyertainya menegaskan bahwa mengoptimalkan dikotomi konten dalam rentang keandalan batas bawah dan batas atas memberikan peta jalan yang jelas dan berbasis bukti untuk advokasi sosial terintegrasi, evaluasi program, dan perumusan kebijakan multi-sektoral di berbagai konteks administratif.

d. Analisis Naratif tentang komunikasi publik digital untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial

Analisis ini diharapkan mengeksplorasi narasi yang muncul dalam komunikasi publik digital kasus untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial secara spesifik di X dan Instagram. Analisis pada gambar 6 dan tabel 2.

Gambar 6.
Analisis Naratif tentang komunikasi publik untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak di platform media sosial

(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)



Tabel 2.
11 Narasi Teratas di Media Sosial untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak

Word	Hitung
perempuan	2701
indonesia	1252
perlindungan	836
kekerasan	794
ruang	734
sahabat	625
keluarga	558
#kemenpppa	515
kemenppa	493
nasional	463
#perempuanberdaya	457

(Sumber: Analisis Nvivo 12Plus)

Topik utama yang diperoleh dari studi frekuensi kata dan representasi awan kata adalah peran penting perempuan dan kesetaraan bagi identitas nasional Indonesia. Elemen cerita yang paling dominan adalah "perempuan" (perempuan), yang muncul 2.701 kali, diikuti oleh "Indonesia" 1.252 kali. Sorotan kedua gagasan ini menunjukkan bahwa perempuan dipandang sebagai pelaku penting dalam kemajuan nasional melalui wacana budaya dan hukum kelembagaan. Keterlibatan aktif negara terlihat melalui frekuensi frasa "KemenPPPA" (493 kali), tagar institusional "#KemenPPPA" (515 kali), dan tagar kampanye "#perempuanberdaya" (perempuan yang diberdayakan; 457 kali).

Ketergantungan antara tema-tema kunci dan indikator digital ini menunjukkan pendekatan metodis terhadap wacana publik yang berupaya menciptakan narasi tentang pemberdayaan perempuan melalui berbagai media. Di tingkat nasional, masalah gender telah diprioritaskan dengan pemantauan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengubah keyakinan sosial dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Bersama dengan percakapan tentang pemberdayaan, data mengungkapkan penekanan tematik yang substansial pada keselamatan dan perlindungan hak-hak esensial dari aktivitas kriminal. Frasa "perlindungan" (perlindungan; 836 kali) dan "kekerasan" (kekerasan; 794 kasus) digunakan, menunjukkan adanya ketakutan besar dan urgensi bersama dalam pengelolaan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Istilah yang paling sering digunakan adalah "ruang" (ruang; 734 kali), "sahabat" (sekutu/teman; 625 kali), dan "keluarga" (keluarga; 558 kali), serta kata-kata seperti "korban" (korban) dan "#anakterlindungi" (anak-anak yang dilindungi), yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para penyintas. Narasi ini menekankan perlunya menciptakan ruang yang aman dalam lingkungan pribadi dan bersama.

Penggunaan istilah "teman" dan "keluarga" menunjukkan pendekatan humanistik berbasis komunitas yang mengandalkan dukungan sosial, dukungan emosional, dan kasih sayang dari lingkaran terdekat individu. Perlindungan telah beralih dari masalah hukum menjadi upaya masyarakat yang luas untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua orang. Dimensi ketiga dari penelitian ini adalah memperkuat kerja sama lintas sektor, memperbaiki mekanisme regulasi, dan menerapkan metode pengajaran modern untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak. Istilah institusional seperti "#kpai," "komnas," "nasional," dan "menteri," bersama dengan kata kerja aksi seperti "memperkuat," "memastikan," dan "langkah," menunjukkan komitmen para pemangku kepentingan terhadap kebijakan transformatif. Aspek pendidikan diperkuat oleh faktor-faktor seperti "komunitas", "pendidikan" dan "lingkungan", menggunakan istilah saat ini seperti "digital" dan "masa depan". Ini merupakan pengakuan bahwa kekhawatiran yang dihadapi perlindungan perempuan saat ini tidak lagi terbatas

pada ranah fisik dan telah meresap ke ranah digital, sehingga membutuhkan aturan yang dapat disesuaikan, kelincahan digital, dan langkah-langkah keamanan siber. Data ini merupakan catatan rinci tentang upaya pemerintah, badan otonom, dan komunitas untuk membangun masa depan Indonesia yang adil, aman, dan berdaya.

KESIMPULAN

Studi komparatif empiris ini mengungkapkan bahwa komunikasi publik digital untuk hak perempuan dan anak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis spesifik platform di Instagram dan X. Instagram berfungsi terutama sebagai repositori visual untuk advokasi hak terstruktur (40,38%) dan pelaporan dampak institusional (49,06%), sedangkan X berfungsi sebagai arena cepat berpusat pada teks yang dioptimalkan untuk pembingkaian narasi (27,45%) dan jangkauan kekerasan dalam rumah tangga secara real-time (17,86%). Status institusional juga menentukan fokus operasional: organisasi bantuan hukum masyarakat sipil seperti Asosiasi LBH APIK mendorong keterlibatan akar rumput dan mobilisasi hukum, sementara entitas negara seperti Kemenpppa dan KPAI mempertahankan postur penyiaran formal yang berfokus pada sosialisasi pendidikan. Yang penting, korelasi Pearson yang sangat kuat (r = 0,8631 sampai 0,9566) menunjukkan bahwa pencegahan, advokasi kasus, pendidikan, dan perlindungan hak berfungsi sebagai ekosistem advokasi yang saling memperkuat dan saling bergantung secara bersama, bukan inisiatif terisolasi. Penanda narasi frekuensi tinggi seperti perempuan, perlindungan, kekerasan, dan ruang menempatkan pemberdayaan dan keselamatan perempuan sebagai pilar sentral identitas sipil nasional. Pada akhirnya, memaksimalkan potensi demokratis dari ruang publik digital ini membutuhkan penjembatanan kesenjangan keterlibatan interaktif dengan menerapkan alur kerja rujukan lintas platform, meja konsultasi aktif, dan mekanisme pelacakan kasus yang transparan, sehingga mengubah siaran media sosial pasif menjadi perlindungan hukum yang konkret dan keadilan sosial yang terukur bagi kelompok rentan. Untuk masa depan, menampilkan hasil institusional yang nyata secara terbuka memperkuat kepercayaan komunitas, mengubah pengikut digital dari pengamat pasif menjadi peserta aktif dalam advokasi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Almeida, D. V, Kolinjivadi, V., Ferrando, T., Roy, B., & ... (2023). "Penghijauan" kekaisaran: Kesepakatan Hijau Eropa sebagai agenda utama UE. Dalam *Politik* .... Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629823001038

Anggraini, P. D., & Wulandari, S. S. (2021). Analisis penggunaan model pembelajaran berbasis proyek dalam peningkatan keaktifan siswa. *Jurnal Pendidikan Administrasi … .* https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/9902

Anwar, A., Malik, M., Raees, V., & Anwar, A. (2020). Peran media massa dan komunikasi kesehatan masyarakat dalam pandemi COVID-19. Dalam *Cureus*. cureus.com. https://www.cureus.com/articles/38293-role-of-mass-media-and-public-health-communications-in-the-covid-19-pandemic.pdf

Azeem, M., Salfi, N. A., & Dogar, A. H. (2012). Penggunaan perangkat lunak NVivo untuk analisis data kualitatif. *Academic Research International*, *2*(1), 262–266.

Azlan, A. A., Hamzah, M. R., Sern, T. J., Ayub, S. H., & Mohamad, E. (2020). Pengetahuan publik, sikap, dan praktik terhadap COVID-19: Studi lintas seksi di Malaysia. Dalam *Plos satu*. journals.plos.org. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233668

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2023). Logika aksi konektif: Media digital dan personalisasi politik yang kontroversial. Dalam *Handbook of digital politics* (hlm. 287–338). Edward Elgar Publishing.

Blank, S., & Blank, S. (2020). *Empat langkah menuju pencerahan*. stanford.edu. http://web.stanford.edu/group/e145/cgi-bin/spring/upload/handouts/E145_FourSteps_Ch1.pdf

Bruns, A. (2021). Setelah "APIcalypse": Platform media sosial dan perjuangan mereka melawan penelitian ilmiah yang kritis. *Disinformasi dan Lockdown Data di Sosial … .* https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781003206972-2&type=chapterpdf

Bucchi, M., & Trench, B. (2021). *Buku panduan Routledge tentang komunikasi publik ilmu pengetahuan dan teknologi*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Em4ZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1937&dq=public+communication&ots=dbfrGQFqGS&sig=UUXdEro3Gj7PL7FEfbypTJ9JLc4

Chanana, N., & Sangeeta. (2021). Praktik keterlibatan karyawan selama lockdown COVID-19. *Jurnal Urusan Publik*. https://doi.org/10.1002/pa.2508

Charmaz, K. (2020). "Dengan teori berakar konstruktivis Anda tidak bisa bersembunyi": Penelitian keadilan sosial dan penyelidikan kritis di ranah publik. *Penyelidikan Kualitatif*. https://doi.org/10.1177/1077800419879081

Cheng, Y., & Jiang, H. (2022). Hubungan pelanggan–merek di era kecerdasan buatan: memahami peran upaya pemasaran chatbot. *Jurnal Manajemen Produk & Merek*. https://www.emerald.com/jpbm/article/31/2/252/458642

Christian, G. M., & Lukitawati, B. (2023). Komunikasi Virtual Pidato Kebangsaan "Indonesia Menang" Prabowo Subianto di Youtube: Komunikasi Virtual Bahasa Nasional "Indonesia Menang" oleh .... … *Jurnal Sarjana Komunikasi (ISJC)*. https://dohara.or.id/index.php/isjc/article/view/514

Clark, M. D. (2020). DRAG THEM: Etimologi singkat dari apa yang disebut "cancel culture." *Komunikasi dan Publik*. https://doi.org/10.1177/2057047320961562

Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2022). *Buku panduan komunikasi krisis*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ryCYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=public+communication&ots=2LhQR4edIw&sig=wmDGRNNWTfgy24N3KTrD-Pkfm6M

Dubé, È., Ward, J. K., Verger, P., & ... (2021). Keraguan, penerimaan, dan anti-vaksinasi: tren dan prospek masa depan untuk kesehatan masyarakat. *Dalam Tinjauan tahunan publik … *. annualreviews.org. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102240

Faria, S. M. De, Fabrício, D. de M., & ... (2020). Efek pemberian cannabidiol akut terhadap kecemasan dan tremor yang dipicu oleh Tes Simulasi Berbicara di Depan Umum pada pasien dengan penyakit Parkinson. *Jurnal … *. https://doi.org/10.1177/0269881119895536

Fraser, N. (2024). Meninjau kembali ruang publik: Kontribusi dalam kritik terhadap demokrasi yang benar-benar ada. *Tulisan Kritis Baru dalam Sosiologi Politik*. https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781003572923-27&type=chapterpdf

Gaber, I., & Fisher, C. (2022). "Kebohongan strategis": Kasus Brexit dan pemilihan Inggris 2019. *Jurnal Internasional Pers/Politik*. https://doi.org/10.1177/1940161221994100

Habermas, J. (2022). Refleksi dan hipotesis tentang transformasi struktural lebih lanjut dari ranah publik politik. *Teori, Budaya & Masyarakat*. https://doi.org/10.1177/02632764221112341

Hauser, G. A. (2022). *Suara vernakular: Retorika publik dan ranah publik*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OclOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=public+communication&ots=O4jxL64msU&sig=ejRyB_Ztbmam9mmxdebBG-GzymQ

Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). Menggunakan NVivo untuk analisis data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Interdisipliner Internasional*

Pendidikan, *2*(2), 181–186.
Hodkinson, P. (2024). *Media, budaya, dan masyarakat: Pengantar*. torrossa.com. https://www.torrossa.com/it/resources/an/5909082
Ienca, M., & Vayena, E. (2020). Tentang penggunaan data digital yang bertanggung jawab untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dalam *kedokteran alam*. nature.com. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0832-5
Kemeny, J. (2025). *Mitos kepemilikan rumah: Pilihan pribadi versus publik dalam kepemilikan perumahan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DduBEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=public+communication&ots=4Xk31QWJRP&sig=yhP0cx-ZUxRIrVaemw9sX7Zu0Yg
Khan, R. U., Salamzadeh, Y., Iqbal, Q., & ... (2022). Dampak manajemen hubungan pelanggan dan reputasi perusahaan terhadap loyalitas pelanggan: Peran mediasi kepuasan pelanggan. *Jurnal Hubungan … .* https://doi.org/10.1080/15332667.2020.1840904
Kim, J. (2021). Periklanan di metaverse: Agenda riset. Di *Jurnal periklanan interaktif*. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/15252019.2021.2001273
Kitagawa, Y., Ishihara, R., Ishikawa, H., Ito, Y., Oyama, T., & ... (2023). Pedoman praktik kanker esofagus 2022 disunting oleh Japan esophageal society: bagian 1. Di *Esofagus*. Springer. https://doi.org/10.1007/s10388-023-00993-2
Lee, V. J., Chiew, C. J., & Khong, W. X. (2020). Menghentikan penularan COVID-19: pelajaran dari upaya penahanan di Singapura. *Jurnal Kedokteran Perjalanan*. https://academic.oup.com/jtm/article-abstract/27/3/taaa039/5804843
Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2011). Analisis data kualitatif di luar perbandingan konstan: Menggunakan NVivo. *School Psychology Quarterly*, *26*(1), 70.
Lipschultz, J. H. (2023). *Komunikasi media sosial: Konsep, praktik, data, hukum, dan etika*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oX-_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2015&dq=public+communication&ots=wrAEJU_EIF&sig=bw8wObJqwFFnF4LPl1dwJG8I4go
Malecki, K. M. C., Keating, J. A., & ... (2021). Komunikasi krisis dan persepsi publik tentang risiko COVID-19 di era media sosial. *Penyakit Infeksi Klinis*. https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/4/697/5858208
McGowan, F. (2020). Menggunakan ilmu perilaku untuk membantu melawan virus corona. Dalam *Jurnal Administrasi Publik Perilaku*. academia.edu. https://www.academia.edu/download/95260228/JA202021.pdf
Mheidly, N., & Fares, J. (2020). Memanfaatkan strategi komunikasi media dan

kesehatan untuk mengatasi infodemik COVID-19: N. Mheidly, J. Fares. Dalam *Journal of Public Health Policy*. Springer. https://doi.org/10.1057/s41271-020-00247-w

Misner, J., & Carr, G. (2023). Penelitian survei. Dalam *Pesan yang Berarti: Berbicara di Depan Umum di … *. nic.pressbooks.pub. https://nic.pressbooks.pub/messagesthatmatter/chapter/survey-research/

Nguyen, M. H., Gruber, J., Fuchs, J., Marler, W., & ... (2020). Perubahan dalam komunikasi digital selama pandemi global COVID-19: Implikasi terhadap ketimpangan digital dan penelitian masa depan. *Media Sosial+ … *. https://doi.org/10.1177/2056305120948255

Norris, P. (2023). Lingkaran kebajikan: Komunikasi politik dalam masyarakat pascaindustri. *Pembaca Komunikasi Politik*. https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781003416654-26&type=chapterpdf

Nurcandrani, P. S., Asriandhini, B., & Turistiati, A. T. (2020). Pelatihan public speaking untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan berbicara pada anak-anak di sanggar ar-rosyid purwokerto. In *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian … *. https://www.ejournal.moestopo.ac.id/index.php/abdimoestopo/article/view/979/552

Nyberg, D. (2021). Korporasi, politik, dan demokrasi: Aktivitas politik korporasi sebagai korupsi politik. *Teori Organisasi*. https://doi.org/10.1177/2631787720982618

Oh, S. H., Lee, S. Y., & Han, C. (2021). Dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku pencegahan selama wabah penyakit menular: Peran mediasi emosi yang relevan dengan diri sendiri dan persepsi risiko publik. *Komunikasi Kesehatan*. https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1724639

Quesenberry, K. A. (2020). *Strategi media sosial: Pemasaran, periklanan, dan hubungan masyarakat dalam revolusi konsumen*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QWTyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=public+communication&ots=BuveSkHKsV&sig=izNu2jsyY5Rr_EUWOG7ChW9jtL0

Rovetta, A., & Bhagavathula, A. S. (2020). Perilaku pencarian web terkait COVID-19 dan sikap infodemik di Italia: Studi infodemiologi. Dalam … *kesehatan masyarakat dan pengawasan*. publichealth.jmir.org. https://publichealth.jmir.org/2020/2/e19374/

Ruler, B. Van. (2020). Teori komunikasi: Pilar yang kurang dihargai yang menjadi dasar komunikasi strategis. *Arah Komunikasi Strategis di Masa Depan*. https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1452240

Samuel, J., Ali, G., Rahman, M. M., Esawi, E., & Samuel, Y. (2020). Wawasan sentimen publik Covid-19 dan pembelajaran mesin untuk klasifikasi tweet. Dalam *Informasi*. mdpi.com. https://www.mdpi.com/2078-2489/11/6/314

Self, P. (2021). *Pemerintahan oleh pasar?: politik pilihan publik*. api.taylorfrancis.com. https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780429039393&type=googlepdf

Servaes, J. (2022). Komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. … *Routledge Handbook of Nonprofit Communication*. https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781003170563-4&type=chapterpdf

Su, Z., McDonnell, D., Wen, J., Kozak, M., Abbas, J., & ... (2021). Konsekuensi kesehatan mental dari liputan media COVID-19: kebutuhan akan praktik komunikasi krisis yang efektif. Dalam *Globalisasi dan … *. Springer. https://doi.org/10.1186/S12992-020-00654-4

Vignato, J., Inman, M., Patsais, M., & Conley, V. (2022). Perangkat lunak analisis data kualitatif berbantuan komputer, fenomenologi, dan metode Colaizzi. *Western Journal of Nursing Research*, *44*(12), 1117–1123.

Waisbord, S. (2020). Pohon keluarga teori, metodologi, dan strategi dalam komunikasi pembangunan. *Buku Panduan Komunikasi untuk Pembangunan dan … *. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2014-3_56

Wang, X., Lin, L., Xuan, Z., Xu, J., Wan, Y., & Zhou, X. (2020). Komunikasi risiko tentang respons perilaku selama COVID-19 di antara populasi umum di Tiongkok: Studi nasional yang cepat. *Jurnal Infeksi*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320306897

Wanless, A., & Berk, M. (2021). Propaganda partisipatif: Keterlibatan audiens dalam penyebaran komunikasi persuasif. Dalam *media sosial dan tatanan sosial*. library.oapen.org. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/53725/9788366675612.pdf?sequence=1page=123#page=123

Welsh, E. (2002). Menangani data: Menggunakan NVivo dalam proses analisis data kualitatif. *Forum: Riset Sosial Kualitatif*, *3*(2).

Yarchi, M., Baden, C., & Kligler-Vilenchik, N. (2021). Polarisasi politik di ranah digital: Analisis lintas platform, bertahap dari waktu ke waktu terhadap polarisasi interaksional, posisi, dan afektif di media sosial. *Komunikasi Politik*. https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1785067

Zulli, D., & Zulli, D. J. (2022). Memperluas meme Internet: Mengkonseptualisasikan mimesis teknologi dan publik tiruan di platform TikTok. *Media Baru & masyarakat*. https://doi.org/10.1177/1461444820983603